

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Partisipasi merupakan istilah yang sering digunakan untuk mengetahui keterlibatan para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan sebuah kebijakan, program, maupun kegiatan. Keterlibatan masyarakat sebagai salah satu elemen negara merupakan hak asasi setiap warga negara yang telah terjamin dalam Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945. Terdapat banyak tokoh yang mendefinisikan partisipasi, salah satunya adalah Slamet (dalam Puspasari, 2020) yang mengatakan bahwa,

“Partisipasi sebagai keterlibatan aktif dan bermakna dalam proses pembentukan keputusan, pelaksanaan program secara sukarela, dan penerima manfaat dari hasil program yang telah dilaksanakan dalam suatu program.”

Pengertian di atas menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat tidak hanya bermakna masyarakat memperoleh kesempatan dalam proses pengambilan keputusan, namun juga memastikan bahwa masyarakat memperoleh manfaat dari penyelenggaraan suatu program atau kebijakan. Dalam konteks penyelenggaraan daerah, partisipasi masyarakat memiliki peran penting, antara lain sebagai sarana bagi masyarakat dalam mengekspresikan kebutuhan mereka sehingga kebijakan yang ditetapkan bersifat responsif terhadap apa yang menjadi kebutuhan dan kepentingan masyarakat sekaligus sebagai wujud kepedulian dan dukungan masyarakat dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan daerah.

Dalam konteks pembangunan, pemuda sebagai bagian dalam masyarakat merupakan pilar masa depan yang memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi positif bagi pembangunan negara. Pemerintah baik pusat maupun daerah membuat berbagai kebijakan dan program kepemudaan untuk meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan baik negara maupun daerah, Hal ini sebagaimana yang disampaikan Juned et al (dalam Wahyuni, Tri & Askafi, 2024) yang mengatakan bahwa,

“Pemuda yang aktif dalam kepemudaan cenderung lebih peka terhadap isu-isu sosial, seperti pendidikan, lingkungan, dan kesehatan masyarakat, yang berkontribusi bagi perbaikan sosial yang lebih luas.”

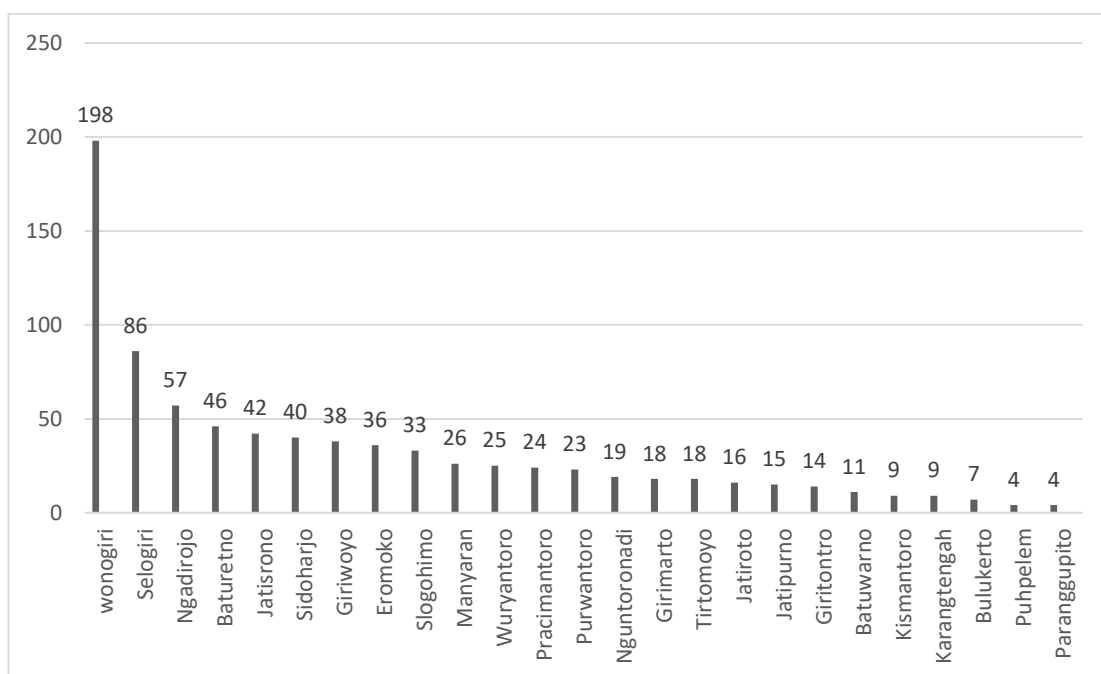
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemuda, sebagai agen perubahan dan motor penggerak inovasi, memiliki peran mendukung peningkatan kualitas masyarakat dalam berbagai aspek. Namun, peran pemuda dalam pembangunan lebih bersifat pendukung, bukan sebagai aktor utama pengambil kebijakan. Kapasitas pemuda, terutama mahasiswa, lebih diarahkan pada dukungan terhadap akselerasi pembangunan melalui kontribusi sosial, inovasi, dan kolaborasi, sementara peran utama pembangunan tetap berada di tangan pemerintah dan pemangku kebijakan lainnya. Hal ini didukung dengan Permenpora Nomor 13 Tahun 2024 pasal 10, yaitu peran aktif pemuda sebagai agen perubahan diwujudkan dengan mengembangkan pendidikan politik dan demokrasi; sumber daya ekonomi; kepedulian terhadap masyarakat; ilmu pengetahuan dan teknologi; olahraga, seni, dan budaya; kepedulian terhadap lingkungan hidup; pendidikan kewirausahaan; dan/atau kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.

Sebagai wujud nyata dukungan pemerintah terhadap peran pemuda, Pemerintah Kabupaten Wonogiri menyelenggarakan Program Pemberian Penghargaan Pemuda Berprestasi yang memberikan kesempatan bagi pemuda untuk berkontribusi dalam mendukung pembangunan daerah. Pemuda berprestasi merupakan penerima beasiswa dari Pemerintah Kabupaten Wonogiri, yang tidak hanya diberikan sebagai bentuk dukungan pendidikan, tetapi juga sebagai dorongan agar pemuda terlibat dalam kegiatan pembangunan. Meski demikian, pemuda berprestasi tidak diharapkan menjadi penggerak utama pembangunan, melainkan berperan sebagai pendukung aktif yang memberi kontribusi sesuai kapasitasnya sebagai pemuda dan mahasiswa. Dengan demikian, fokus partisipasi mereka adalah memperkuat keberhasilan program pemerintah melalui aksi nyata di tengah masyarakat, bukan menggantikan peran institusional pemerintah dalam pembangunan.

Berangkat dari Program Pemberian Penghargaan Pemuda Berprestasi sebagai salah satu program unggulan Pemerintah Kabupaten Wonogiri, pemuda Kabupaten Wonogiri memiliki kesempatan yang terbuka untuk berpartisipasi dalam akselerasi pembangunan daerah. Pemuda Berprestasi adalah penerima penghargaan beasiswa dari Pemerintah Kabupaten Wonogiri sebagai bentuk dukungan atas pendidikan masyarakat dan upaya meningkatkan kualitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Wonogiri. Program yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Kepemudaan ini dialokasikan dari dana APBD Kabupaten Wonogiri. Program ini dimulai pada tahun 2016 dengan nama "Beasiswa Mahasiswa Berprestasi

Kabupaten Wonogiri”, yang kemudian pada tahun 2022 berubah nama menjadi “Penghargaan bagi Pemuda Berprestasi Kabupaten Wonogiri”. Pada dua tahun pertamanya, program ini hanya diperuntukkan bagi mahasiswa Wonogiri dari golongan keluarga kurang mampu. Namun, mulai tahun 2018 hingga sekarang, program ini diperuntukkan untuk seluruh mahasiswa Kabupaten Wonogiri, baik dari perguruan tinggi negeri maupun swasta dengan akreditasi A/unggul.

Bagan 1. 3 Data penerima penghargaan tiap kecamatan



Sumber: Arsip Imapres Wonogiri, 2024

Jumlah keseluruhan mahasiswa penerima penghargaan tahun 2023 adalah 818 mahasiswa yang berasal dari berbagai perguruan tinggi negeri atau swasta dengan akreditasi A/unggul. Mahasiswa paling banyak berasal dari Kecamatan Wonogiri, yaitu sejumlah 198. Kecamatan Wonogiri memiliki anggota paling banyak mengingat bahwa sebagian besar mahasiswa-mahasiswa

di Kabupaten Wonogiri berdomisili di Kecamatan Wonogiri. Anggota terbanyak kemudian berasal dari Kecamatan Selogiri dan Ngadirojo.

Dalam program pemberian penghargaan ini, pemuda berprestasi tidak hanya sekadar menerima penghargaan berupa biaya pendidikan, namun mereka juga diharapkan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan yang mendukung akselerasi pembangunan daerah. Melalui keterlibatan langsung dalam berbagai proyek atau inisiatif, pemuda berprestasi diharapkan mampu membentuk kolaborasi yang melahirkan perubahan dan dampak positif bagi masyarakat. Partisipasi pemuda berprestasi ini didukung dengan adanya surat pernyataan komitmen yang wajib ditandatangani oleh setiap mahasiswa yang menerima penghargaan. Surat pernyataan komitmen ini merupakan bentuk evaluasi dalam meningkatkan partisipasi dan kontribusi aktif pemuda berprestasi.

Di bawah pengawasan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata serta Bupati Wonogiri, Ikatan Mahasiswa Berprestasi (Imapres) sebagai organisasi independen melakukan fungsi pengorganisasian agar seluruh mahasiswa penerima penghargaan dapat menunjukkan kontribusi dan partisipasi aktifnya kepada daerah. Dengan visi mendukung program pembangunan daerah melalui program kerja dengan berpedoman pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs), mahasiswa penerima penghargaan dibagi menjadi beberapa kelompok pengembangan berdasarkan lingkungan asal kecamatan. Berikut merupakan daftar kelompok pengembangan pada periode penerima 2023.

Tabel 2.1 Pembagian Kelompok pengembangan

No	Kelompok Pengembangan	Jumlah anggota
1	Baturetno	46
2	Batuwarno & Karangtengah	20
3	Bulukerto & Puhpelem	11
4	Eromoko	36
5	Girimarto	18
6	Giritontro & Paranggupito	18
7	Giriwoyo	38
8	Jatipurno	15
9	Jatiroto	16
10	Jatisrono	42
11	Kismantoro	9
12	Manyaran	26
13	Ngadirojo	57
14	Nguntoronadi	19
15	Pracimantoro	24
16	Purwantoro	23
17	Selogiri 1	52
18	Selogiri 2	34
19	Sidoharjo	41
20	Slogohimo	33
21	Tirtomoyo	18
22	Wonogiri 1	32
23	Wonogiri 2	26
24	Wonogiri 3	20
25	Wonogiri 4	31
26	Wonogiri 5	30
27	Wonogiri 7	30
28	Wonogiri 8	28
29	Wuryantoro	25

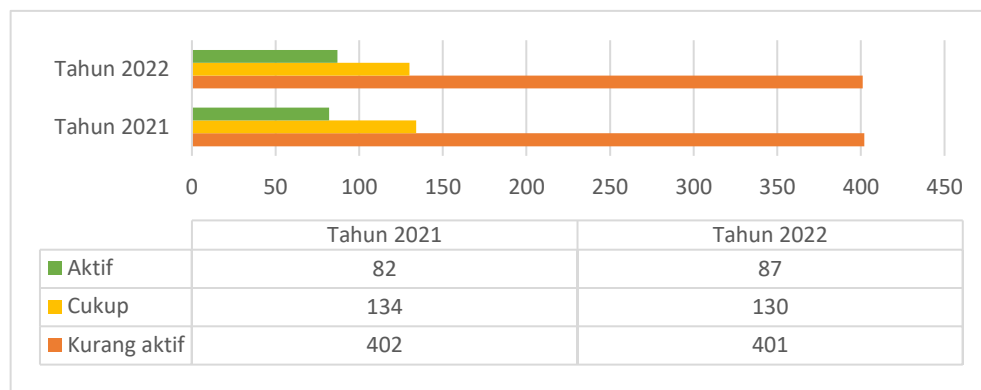
Sumber: Arsip Imapres Wonogiri, 2024

Keaktifan pemuda berprestasi menjadi poin penting dalam penelitian ini, dimana keaktifan tersebut menggambarkan partisipasi pemuda berprestasi dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan baik oleh OPD di lingkungan Kabupaten Wonogiri, Imapres, maupun masing-masing kelompok pengembangan. Bupati Wonogiri menyampaikan,

“Mungkin jika di skala 1-10, nilai kontribusi mereka pada poin 5-7. Kami pelan-pelan untuk pembangunan karakter mereka. Sebab, banyak orang pintar tetapi tidak berkarakter. Karakter itu akan terbangun saat mereka turun ke lapangan, berinteraksi, melihat kemiskinan dan kesenjangan. Yang penting, pembangunan karakter itu.” (Praditia, 2022).

Sebagai pengelola, Imapres membuat penilaian khusus untuk mengukur partisipasi aktif dan kontribusi mahasiswa penerima penghargaan. Keaktifan mahasiswa penerima penghargaan dapat dilihat melalui grafik berikut,

Bagan 1. 4 Data Keaktifan Mahasiswa Penerima Penghargaan Pemuda Berprestasi



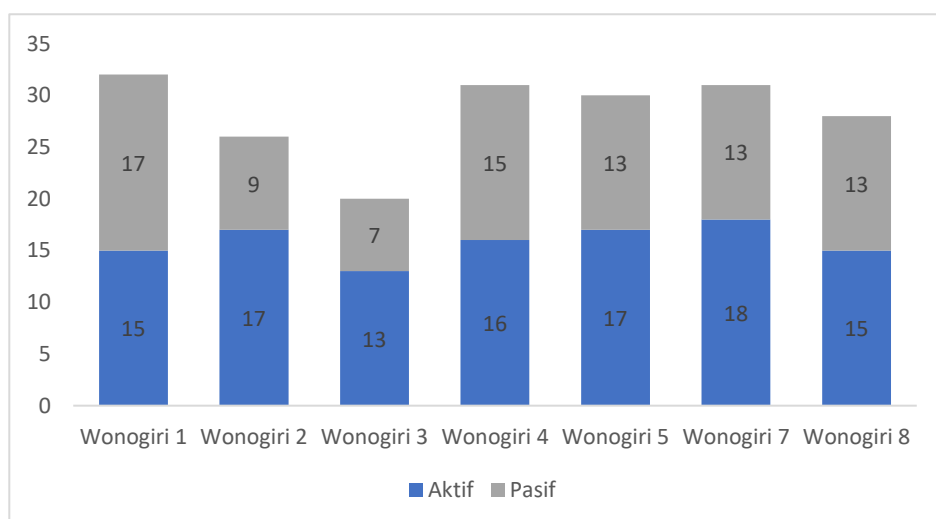
Sumber: Olahan peneliti berdasarkan angka kasar poin keaktifan periode 2023

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase mahasiswa penerima penghargaan yang masuk dalam kategori aktif hanya 13,3% pada tahun penerimaan 2021 dan 14% pada tahun penerimaan 2022 dari total keseluruhan yaitu 618 mahasiswa penerima penghargaan pemuda berprestasi. Poin keaktifan diperoleh mahasiswa penerima penghargaan setelah mereka aktif dalam suatu kegiatan yang diselenggarakan oleh Ikatan Mahasiswa Berprestasi (Imapres), Dispora atau lini pemerintah lain, maupun kegiatan kelompok pengembangan dari masing-masing kecamatan tempat mahasiswa tinggal. Poin keaktifan ini

diadakan untuk menstimulasi dan memotivasi mahasiswa penerima penghargaan untuk menunjukkan kontribusi nyata dalam pembangunan daerah. Namun pada kenyataannya, jargon “Mapres Wonogiri, berprestasi, berkontribusi untuk Wonogiri” belum bisa sepenuhnya diimplementasikan oleh mahasiswa penerima penghargaan.

Sebagai Kecamatan dengan penerima penghargaan pemuda berprestasi terbanyak, keaktifan dari setiap kelompok pengembangan menunjukkan kondisi yang bervariasi. Poin keaktifan dari setiap anggota pada masing-masing kelompok pengembangan diperoleh dari kehadiran/presensi pada kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh kelompok pengembangan terkait. Poin Keaktifan dari masing-masing kelompok pengembangan di Kecamatan Wonogiri tertera pada bagan berikut.

Bagan 1.3 Poin Keaktifan Kelompok Pengembangan di kecamatan Wonogiri



Sumber: Olahan peneliti berdasarkan angka kasar poin keaktifan periode 2023

Berdasarkan bagan di atas, dapat diketahui bahwa masing-masing kelompok pengembangan menunjukkan pola yang mirip dimana anggota yang aktif berkisar pada jumlah belasan. Angka tersebut diperoleh berdasarkan rata-rata poin keaktifan setiap anggota pada kegiatan yang diadakan oleh masing-masing kelompok pengembangan. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa jumlah anggota pasif pada kelompok pengembangan Wonogiri 1 lebih banyak dari anggota yang aktif. Hal ini menunjukkan tingkat partisipasi yang cenderung lebih rendah dibanding kelompok pengembangan lain.

Selain poin keaktifan dari setiap anggota, kelompok pengembangan yang berkontribusi aktif akan memperoleh predikat “Best Kelbang”. Predikat ini diberikan berdasarkan banyaknya kegiatan yang terlesenggara dan kesesuaian dengan poin-poin Sustainable Development Goals (SDGs). Masing-masing kelompok pengembangan di wilayah Kecamatan Wonogiri telah menjalankan berbagai kegiatan guna mendukung akselerasi pembangunan, namun masih ada satu kelompok pengembangan yang belum mendapatkan predikat “best kelbang”, yaitu kelompok pengembangan Wonogiri 1 dari lingkungan Kelurahan Wonokarto. Situasi ini menarik untuk diteliti lebih lanjut, terutama mengenai bagaimana partisipasi pemuda berprestasi di kelompok tersebut serta faktor-faktor apa yang mungkin menghambat partisipasi mereka.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rahmat Triadi Apriansyah Liambo dengan judul “Partisipasi Pemuda dalam Pelaksanaan Musrenbangdes di Desa Wonggeduku Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara” telah menemukan tingkat partisipasi pemuda dalam Musrenbangdes

beserta faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi tersebut. Hasil menunjukkan bahwa partisipasi pemuda pada perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemanfaatan termasuk pada kategori partisipasi rendah. Adapun faktor yang mempengaruhinya dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal antara lain tingkat pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya keterlibatan pemuda dalam pembangunan desa sedangkan pengaruh dari eksternal adalah kurangnya sosialisasi dari pemdes kepada pemuda dan adanya anggapan bahwa pendapat pemuda kurang penting untuk dijadikan pertimbangan dalam pelaksanaan pembangunan.

Mengingat bahwa mahasiswa penerima penghargaan memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah, peneliti akan mengkaji melalui pendekatan partisipasi sebagaimana yang disampaikan oleh Wayan Sutrisna (dalam Fanaqi et al., 2023) bahwa,

“Pendekatan partisipatif dalam pembangunan akan berimbas pada terwujudnya hasil pembangunan yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Pelibatan seluruh komponen masyarakat harus dimulai sejak awal, termasuk dari penyusunan perencanaan kegiatan agar proyek-proyek yang dilaksanakan merupakan proyek-proyek yang benar-benar diperlukan oleh masyarakat sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan mereka.”

Kelurahan Wonokarto menjadi lokus penelitian karena mewakili kontradiksi antara potensi dan realisasi partisipasi pemuda berprestasi. Meski berasal dari kecamatan dengan jumlah penerima penghargaan terbanyak, kelompok ini menunjukkan tingkat keaktifan yang relatif rendah. Situasi ini penting untuk diteliti guna mengetahui bentuk partisipasi pemuda berprestasi serta faktor penghambatnya dalam akselerasi pembangunan di wilayah tersebut.

Penelitian ini akan melihat bagaimana partisipasi pemuda berprestasi dalam akselerasi pembangunan di Kelurahan Wonokarto dan apa saja faktor penghambat dari partisipasi tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dituliskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana partisipasi pemuda berprestasi dalam akselerasi pembangunan di Kelurahan Wonokarto?
2. Apa saja faktor penghambat partisipasi pemuda berprestasi dalam akselerasi pembangunan di Kelurahan Wonokarto?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis partisipasi pemuda berprestasi dalam akselerasi pembangunan di Kelurahan Wonokarto.
2. Menganalisis faktor penghambat partisipasi pemuda berprestasi dalam akselerasi pembangunan di Kelurahan Wonokarto.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran guna mengembangkan ilmu pengetahuan Administrasi Publik pada umumnya dan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri pada khususnya. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan pemahaman lebih dalam tentang peran pemuda untuk partisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini berguna untuk memperdalam ilmu pengetahuan bagi peneliti. Penelitian ini menggunakan metode dan teori yang digunakan selama proses penelitian sebagai acuan untuk membandingkan dengan penelitian lain.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bermanfaat sebagai wadah penyedia informasi kepada masyarakat umum terkait dengan

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini bisa dijadikan sebagai acuan atau dasar bagi pemerintah dalam melakukan evaluasi dan mengembangkan inovasi.

1.5 KERANGKA TEORI

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis, Judul, Nama Jurnal	Landasan Teori	Metode penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dan Kontribusi
1.	(Pangemanan et al., 2020) Fidrian Pangemanan, Johny Lumolos, Fanley Pangemanan Partisipasi Organisasi Kepemudaan dalam Pengawasan Pembangunan Desa Lompad Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan Development Resources Management Review	Bentuk partisipasi yang dikemukakan Oakley (2010): 1. Partisipasi sebagai kontribusi 2. Partisipasi sebagai organisasi 3. Partisipasi sebagai pemberdaya	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa organisasi kepemudaan yang ada di Desa Lompad berkontribusi dengan selalu turut serta dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan, namun ketika diadakan musyawarah hanya segelintir pemuda yang hadir.	Teori ini menggunakan teori partisipasi dari Oakley namun dengan dimensi yang berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini akan memberikan sudut pandang baru terhadap penelitian yang akan dilakukan dengan metode yang sama, yaitu deskriptif kualitatif.

2.	(Liambo, 2021) Rahmat Triadi Apriyansyah Liambo Partisipasi pemuda dalam pelaksanaan Musrenbangdes di Desa Wonggeduku Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara	Dimensi partisipasi menurut Moeliono: 1. Dimensi perencanaan 2. Dimensi perencanaan pelaksanaan 3. Dimensi pengendalian 4. Dimensi pemanfaatan	Metode campuran	Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa: 1. Partisipasi pemuda dalam perencanaan masih rendah 2. Partisipasi dalam pelaksanaan perencanaan masih rendah	Penelitian ini menggunakan metode campuran dengan pendekatan partisipasi menurut Moeliono, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan partisipasi menurut Oakley. Penelitian ini berkontribusi dalam memberikan sudut pandang lain terkait partisipasi pemuda dalam pembangunan.
3.	(Nurhusna, 2024) Nabila Nurhusna, Kismartini, Sri Suwitri Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah Ngudi Lestari	Lima indikator partisipasi masyarakat (Oakley, 1991): 1. Kontribusi masyarakat 2. Pengorganisasian masyarakat 3. Peran masyarakat 4. Aksi masyarakat	Deskriptif kualitatif	Penelitian ini mendapati fenomena dimana masyarakat telah berpartisipasi dalam hal kontribusi masyarakat, pengorganisasian masyarakat, peran masyarakat, aksi dan tanggung jawab	Penelitian ini memiliki objek dan subjek penelitian yang berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan. Namun, penelitian ini menggunakan teori yang sama dengan penelitian yang akan

	Kelurahan Tinjomoyo Kota Semarang Journal of Public Policy and Management Review	5. Tanggung jawab masyarakat		masyarakat. Namun demikian, ke lima indikator tersebut belum dilakukan secara efektif karena partisipasi lebih didominasi petugas bank sampah.	dilakukan, yaitu dimensi partisipasi menurut Oakley (1991)
4.	(Sukron Ma'mun et al., 2023) Keterlibatan Komunitas: Mengoptimalkan Tempat Pengelolaan Sampah 3R di Gladak Anyar Pamekasan <i>Journal Publicuho</i>	Indikator partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh Peter Oakley: 1. Adanya kontribusi 2. Adanya pengorganisasian 3. Peran masyarakat dan aksi masyarakat 4. Motivasi masyarakat 5. Tanggung jawab masyarakat	Deskriptif kaulitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah TPS 3R di Kelurahan Gladak Anyar berjalan dengan baik dengan mengadakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, namun masih ditemukan bahwa belum sepenuhnya masyarakat memiliki kesadaran dalam pemilihan sampah organik dan anorganik.	Penelitian ini meneliti objek dan subjek yang berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan, namun teori yang digunakan sama yaitu dimensi partisipasi dari Peter Oakley (1991)

5.	(Purwanti, 2022) Partisipasi Masyarakat dalam Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) (Studi di Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu) Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik	Jenis dan tahapan partisipasi (Cohen dan Uphof): 1. Partisipasi dalam pembuatan keputusan 2. Partisipasi dalam pelaksanaan program 3. Partisipasi dalam memperoleh manfaat 4. Partisipasi dalam evaluasi	Deskriptif Kualitatif	Penelitian ini menunjukkan bahwa tahapan partisipasi masyarakat belum sepenuhnya dilakukan. Hal ini karena pengambilan keputusan hanya dilakukan pada tingkat atas saja tanpa melibatkan masyarakat, tidak banyak masyarakat yang membantu, dan adanya protes dan kritik warga terhadap pembangunan. Namun, masyarakat banyak memiliki evaluasi dan harapan pada program ini.	Penelitian ini menggunakan teori yang berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan, namun masih dalam lingkup partisipasi. Dimensi partisipasi yang digunakan dalam penelitian ini lebih berfokus pada tahapan, sedangkan dimensi yang akan digunakan pada penelitian yang akan dilakukan berfokus pada bentuk partisipasi. Penelitian ini berkontribusi untuk memberikan sudut pandang lain terkait partisipasi.
6.	(Meuraksa, Muhammad., 2020) Peranan Karang Taruna dalam Upaya Penyelenggaraan dan	Indikator peran karang taruna: 1. Peran dalam memfasilitasi kelompok	Kualitatif	Penelitian ini menunjukkan bahwa peranan karang taruna dalam upaya penyelenggaraan dan pembangunan sosial	Penelitian ini dilakukan dengan subjek yang berbeda dari penelitian yang dilakukan, yaitu karang taruna

	Pembangunan Kesejahteraan Sosial Kecamatan Pamulang Humanika: Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora	2. Peran dalam mengorganisir 3. Peran dalam membangkitkan kesadaran masyarakat 4. Peran dalam menyampaikan informasi 5. Peran dalam melakukan pelatihan 6. Peran dalam pembinaan kesejahteraan sosial		di lingkup RW 016 Kelurahan Banda Baru Kecamatan Pamulang sangat baik, namun tetap perlu dilakukan upaya peningkatan pengetahuan dan pembinaan untuk menciptakan generasi remaja yang berkualitas. Pembinaan ditujukan bagi pengurus karang taruna yang belum cakap dalam kepemimpinan dan pengelolaan organisasi	sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah pemuda berprestasi. Penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan sama-sama membahas tentang pembangunan di suatu daerah, namun dikaji dengan pendekatan yang berbeda. penelitian ini menggunakan pendekatan peran, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan pendekatan partisipasi. Adapun persamaan aspek yang dikaji dari dua pendekatan ini adalah terkait pengorganisasian.
7.	(Nur, 2019)	Jenis partisipasi (Cohen dan Uphof):	kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ruang untuk	Penelitian ini menggunakan teori yang berbeda dengan

	Partisipasi Pemuda dalam Pengembangan Desa Wisata di Kelurahan Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda Jurnal Administrative Reform	1. Partisipasi dalam pembuatan dan pengambilan keputusan 2. Partisipasi dalam implementasi dan pelaksanaan 3. Partisipasi dalam menikmati hasil 4. Partisipasi dalam evaluasi		berpartisipasi dalam pengambilan keputusan sudah tersedia bagi pemuda. Kemudian, pemuda selalu dilibatkan dalam kegiatan budaya. Dari sisi hasil, pemuda merasa memperoleh keuntungan secara finansial dari keterampilan yang mereka dapatkan dari kegiatan di desa wisata. Tidak sampai disitu, pemuda juga memberikan masukan serta saran perbaikan terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan di desa wisata	teori yang akan digunakan pada penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini juga memiliki fokus yang berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu berfokus pada pengembangan desa wisata. Hasil penelitian ini memberikan sudut pandang lain terkait partisipasi pemuda.
8.	(Mardiyah, 2019) Revitalisasi Karang taruna untuk Meningkatkan	Tahapan partisipasi menurut Ericson (1994): 1. Partisipasi dalam tahap perencanaan	Deskriptif kualitatif	Hasil penelitian ini adalah, 1) partisipasi pemuda dalam perencanaan program masih kurang, 2)	Penelitian ini menggunakan teori partisipasi yang berbeda dengan penelitian yang akan

	Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Desa di Desa Tretes Kecamatan Prigen kabupaten Pasuruan Jurnal Pendidikan untuk Semua	2. Partisipasi pada tahap pelaksanaan 3. Partisipasi dalam tahap pemanfaatan		dalam pelaksanaan program, Karang Taruna Sobowono menunjukkan antusias karena mereka lebih suka menunjukkan aksi daripada melakukan perencanaan program, 3) pada tahap pemanfaatan program, Karang Taruna Sobowono turut serta dalam pemanfaatan dan pengembangan program agar program tersebut terus berlanjut.	dilakukan, namun penelitian ini berkontribusi dari metode yang digunakan dan konteks penelitian ini juga dalam konteks pembangunan
9.	(Nurhidayah et al., 2023) Jejaring Aktor Dalam Implementasi Kebijakan Pemberian Penghargaan Bagi Pemuda Berprestasi (Perbup No. 41 Tahun 2022)	Lima peran aktor (Nugroho dalam Handayani dan Warsono, 2017): 1. Policy creator 2. Koordinator 3. Fasilitator 4. Implementator 5. Akselerator	Deskriptif Kualitatif	1. Policy creator yaitu Disporapar Kab. Wonogiri 2. Koordinator adalah Disporapar Kab. Wonogiri 3. Fasilitator antara lain	Penelitian ini sama-sama berkaitan dengan program pemberian penghargaan bagi pemuda berprestasi dengan penelitian yang dilakukan, namun penelitian ini berfokus untuk

	Journal of Public Policy and Management Review			Bank Jateng dan OPD 4. Akselerator antara lain PT Azmedia, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, media dan Imapres Wonogiri Implementor yaitu Imapres Wonogiri dan masyarakat	menjelaskan aktor beserta perannya, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada partisipasi subjek penelitian yaitu pemuda penerima penghargaan. Penelitian ini berkontribusi bagi penulis dalam menentukan subjek penelitian.
10.	(Zamzani, 2024) Analisis Program CSR 'Beasiswa Mahagora' oleh PT Mahagora dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial	Sistematika pelaksanaan program: 1. Planning 2. Action and Communication 3. Monitoring and Evaluation Hambatan dalam pelaksanaan program CSR Beasiswa Mahagora	Deskriptif Kualitatif	Hambatan dalam pelaksanaan program beasiswa: kesulitan untuk mengendalikan dan keep in touch dengan penerima beasiswa yang berkuliah di luar Surabaya.	penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan memiliki kesamaan pada program beasiswa, namun sumber beasiswa yang berbeda. penelitian ini juga memiliki fokus yang berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan, dimana penelitian ini berfokus pada pelaksanaan

					program pemberdayaan masyarakat sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada partisipasi masyarakat dari golongan pemuda berprestasi dalam pembangunan daerah
--	--	--	--	--	---

Penelitian yang akan dilakukan penulis memiliki kesamaan fokus dengan penelitian yang dilakukan oleh Fidrian Pangemanan, Johny Lumolos, Fanley Pangemanan, yaitu menganalisis tentang partisipasi pemuda dalam pembangunan dengan judul “Partisipasi Organisasi Kepemudaan dalam Pengawasan Pembangunan Desa Lombad Kecamatan Ranoyapo Kabupetan Minahasa Selatan”. Lokasi ini dipilih karena Wonokarto merupakan salah satu kelurahan di Wonogiri dengan jumlah penerima penghargaan Pemuda Berprestasi yang signifikan, namun belum ada kajian yang secara spesifik menganalisis sejauh mana mereka berkontribusi dalam pembangunan daerah.

Penelitian yang akan dilakukan menggunakan teori partisipasi menurut Oakley (1991) yang terdiri dari lima dimensi partisipasi, yaitu kontribusi, pengorganisasian, peran, aksi dan tanggung jawab. Pemilihan dimensi menurut Oakley ini memungkinkan pengumpulan data yang lebih relevan terkait partisipasi pemuda dalam menyelesaikan permasalahan di masyarakat, bukan hanya meninjau dari sisi proses pengambilan keputusan, pelaksanaan dan evaluasi. Kemudian, penelitian ini juga akan menganalisis terkait faktor penghambat partisipasi pemuda berprestasi dalam akselerasi pembangua di Kelurahan Wonokarto menggunakan dimensi yang dikemukakan oleh Slamet (1982), yaitu kesempatan, kemauan dan kemampuan.

1.5.2 Administrasi Publik

Administrasi publik merupakan konsep yang kompleks, sehingga terdapat banyak variasi definisi dan belum ada kata sepakat mengenai batasan dari definisi “administrasi publik” itu sendiri. Nigro & Nigro (dalam Keban, 2019) mengemukakan bahwa,

“Administrasi publik adalah kerja sama kelompok dalam lingkungan publik yang mencakup tiga cabang, yaitu yudikatif, legislatif dan eksekutif; yang berperan memformulasikan kebijakan publik sehingga menjadi bagian proses politik; cara yang ditempuh sangat berbeda dengan cara yang ditempuh administrasi swasta; dan berkaitan erat dengan beberapa pihak swasta dan individu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.”

Sejalan dengan konsep administrasi publik yang kompleks, Rosenbloom memberi batasan administrasi publik sekaligus menekankan aspek institusional dari tiga jenis kegiatan pemerintah yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam menjalankan fungsi pelayanan dan pengaturan terhadap keseluruhan atau sebagian masyarakat (Keban, 2019).

Berdasarkan pendapat dua tokoh di atas, dapat dipahami bahwa administrasi publik merupakan proses memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh institusi dari tiga cabang, yaitu legislatif, yudikatif dan eksekutif. Tiga cabang kekuasaan ini berperan dalam memformulasikan kebijakan publik dengan melibatkan aktor lain, yaitu swasta, individu atau masyarakat. Namun demikian, definisi administrasi ini masih cenderung bersifat politik, sehingga sulit

diterima kalangan umum. Shafritz dan Russel (dalam Keban, 2019) memberikan definisi administrasi publik dalam empat kategori, yaitu:

- 1) Kategori politik, administrasi publik dilihat sebagai apa yang dilakukan oleh pemerintah.
- 2) Kategori legal/hukum melihat administrasi publik sebagai penerapan hukum dan regulasi.
- 3) Kategori manajerial melihat administrasi publik sebagai bentuk eksekutif atau mencapai suatu hasil melalui orang lain (bentuk manajemen)
- 4) Dari kategori mata pencaharian, administrasi publik sebagai bentuk okupasi dimana semua orang yang bekerja ingin meraih impiannya dan sebagai ilmu yang berfokus pada ilmu manajemen untuk kemudian diterapkan dalam sektor publik.

Empat kategori administrasi di atas menunjukkan fokus dan peran yang berbeda-beda. Pada kategori politik, pemerintah berperan dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dalam kategori hukum, administrasi publik melibatkan peran hukum guna memastikan kegiatan-kegiatan dalam administrasi publik berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sedangkan kategori manajerial fokus pada aspek manajemen dan organisasi untuk mengarahkan kegiatan administrasi publik untuk mencapai suatu tujuan. Adapun kategori mata pencaharian

fokus pada pekerjaan dan profesionalisme yang melibatkan peran pegawai negeri sipil dalam menjalankan tugas dan fungsi administrasi publik.

Kemudian, Nicholas Henry mengemukakan bahwa terdapat beberapa ruang lingkup yang dilihat dari unsur-unsur di luar perkembangan ilmu administrasi publik itu sendiri, yaitu organisasi publik yang berkenaan dengan model organisasi dan perilaku birokrasi; manajemen publik yang berkenaan dengan struktur dan teori manajemen, termasuk pengelolaan anggaran dan SDM serta evaluasi program; serta implementasi yaitu menyangkut strategi dalam pengembangan kebijakan publik dan pelaksanaannya, privatisasi, koordinasi antar pemerintah serta etika birokrasi.

1.5.3 Paradigma Administrasi Publik

Secara sederhana, paradigma administrasi publik adalah kerangka pikir dan metode penelitian yang digunakan oleh para ahli untuk memahami dan mendalami fenomena administrasi publik. Para ahli membagi paradigma administrasi publik menjadi beberapa kelompok (Yusri, 2020), antara lain:

1) Paradigma Tradisional atau Klasikal

Paradigma ini muncul dan berkembang pada abad ke-20 oleh tokoh terkenal seperti Max Weber dan Henry Fayol. Dasar paradigma ini adalah model organisasi birokrasi weberian yang menekankan aspek efisiensi, hierarki dan kontrol yang diatur

sedemikian rupa untuk mencapai tujuan. Namun demikian, paradigma ini mendapat kritikan karena dianggap kurang memperhatikan sisi kemanusiaan dan sosial yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan.

2) Paradigma Neoklasik

Paradigma neoklasik merupakan paradigma yang muncul pada kisaran tahun 1950-an. Paradigma ini muncul sebagai reaksi dari paradigma tradisional yang waktu itu mendapat kritikan. Paradigma ini mengedepankan konsep pemilihan rasional dalam pengambilan keputusan. Dalam paradigma ini, administrasi publik dipandang sebagai suatu sistem yang harus diatur sedemikian rupa untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Namun demikian, paradigma juga menuai kritikan sebab paradigma ini dianggap terlalu berfokus pada teknis dan keuangan yang mengakibatkan sisi sosial dan politiknya menjadi terabaikan

3) Paradigma *New Public Administration*

Paradigma NPA merupakan paradigma yang mengedepankan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Paradigma ini merupakan respon dari kritikan terhadap paradigma klasik yang dikritik kurang bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang rumit. Selain memfokuskan pada partisipasi publik, paradigma ini juga fokus dan memberikan perhatian lebih pada

kepentingan publik dan manajemen yang baik. Dalam perkembangannya, paradigma ini juga tidak lepas dari kritik karena dianggap terlalu idealis sehingga sulit diimplementasikan dan kurang memperhatikan aspek ekonomi politik dalam proses pengambilan keputusan.

4) Paradigma Baru

Paradigma baru merupakan paradigma yang muncul pada tahun 1970-an yang menekankan pada konsep nilai publik dalam pengambilan keputusan. Administrasi publik dinilai sebagai sistem yang rumit dengan adanya pengaruh dari faktor-faktor sosial dan politik. Paradigma ini memperoleh kritikan karena dinilai sulit diimplementasikan dalam praktik administrasi publik sebab sifatnya yang terlalu abstrak.

5) Paradigma *New Public Management* (NPM)

Paradigma NPM populer sejak tahun 1980-an. Paradigma ini menekankan pentingnya efisiensi, produktivitas, dan akuntabilitas karena pelayanan publik harus dikelola layaknya layanan bisnis yang dilakukan oleh pihak swasta. Paradigma ini menuntun untuk fokus pada hasil yang akan dihasilkan untuk mengukur kinerja dan dasar pengambilan keputusan. Namun demikian, hal tersebut menjadi justru menjadi boomerang yang melemahkan paradigma itu sendiri dimana para ahli menilai paradigma ini tertuju pada aspek ekonomi dan bisnis yang

akhirnya mengesampingkan peran dan tanggung jawab pemerintah.

6) Paradigma Tata Kelola Publik (*Good Governance*)

Pada tahun 1990-an, paradigma ini mulai berkembang dengan mengedepankan manajemen yang baik, partisipasi publik serta memperhatikan aspek sosial, politik dan ekonomi dalam proses pengambilan keputusan dalam tata Kelola pemerintahan. Ada tiga pilar *governance*, yaitu pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Paradigma *governance* menekankan pada kolaborasi dan kesetaraan antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat.

Penelitian ini menekankan pada paradigma *governance*. Menurut Bob Sugeng Hadiwinata (dalam Santosa, 2008), yang mengasumsikan bahwa *good governance* haruslah menciptakan sinergi antara sektor pemerintah (menyediakan perangkat aturan dan kebijakan), sektor bisnis (menggerakkan roda perekonomian) dan sektor *civil society* (aktivitas swadaya guna mengembangkan produktivitas, efektivitas dan efisiensi). Dalam konteks pembangunan, terdapat empat aspek penting dalam rangka partisipasi dalam pembangunan (Listyaningsih, 2014), antara lain:

1. Terlibat dan ikut sertanya rakyat tersebut dengan mekanisme proses politik dalam suatu negara turut menentukan arah,

strategi dan kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah.

2. Meningkatkan artikulasi (kemampuan) untuk merumuskan tujuan-tujuan terutama cara-cara dalam merencanakan tujuan.
3. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan nyata yang konsisten dengan arah, strategi dan rencana yang telah ditentukan.
4. Adanya perumusan dan pelaksanaan program-program partisipatif dalam pembangunan yang berencana.

1.5.4 Manajemen Publik

Konsep manajemen publik merupakan studi yang terbentuk dari beberapa disiplin ilmu. Ilmu manajemen publik ditopang oleh disiplin ilmu lain, seperti ilmu manajemen, administrasi publik, politik, kebijakan publik, ilmu ekonomi, ilmu sosial dan lain-lain. Secara etimologis, manajemen publik terdiri dari istilah “manajemen” dan “publik.

Stoner (1982) mengartikan manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian kegiatan anggota organisasi termasuk penggunaan seluruh sumber daya yang dimiliki organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Dr. Iwan Satibi, 2012). Pendapat lain, yaitu Koontz & Weihrich (1993) mengartikan manajemen sebagai pencapaian sesuatu tujuan yang dilakukan melalui dan dengan orang lain (Dr. Iwan Satibi, 2012).

Maksud dari penggunaan potensi sumber daya manusia berdasarkan definisi manajemen dari dua ahli tersebut adalah bagaimana seorang pimpinan dan organisasi secara keseluruhan mampu menampilkan sumber daya manusia yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan organisasi, baik dari kuantitas maupun kualitas. Tidak hanya SDM, manajemen juga membutuhkan perlengkapan atau fasilitas, anggaran, metode kerja, dan sumber daya teknologi. Maka, secara komprehensif, konsep manajemen setidaknya memiliki karakteristik (Dr. Iwan Satibi, 2012), sebagai berikut:

- 1) Adanya kegiatan yang dilakukan pemimpin
- 2) Berhubungan dengan pencapaian tujuan
- 3) Menggunakan sumber daya organisasi
- 4) Dilakukan secara sadar dan terus menerus

Selanjutnya, untuk kata “publik” memiliki pengertian yang luas, bisa sebagai masyarakat yang artinya sistem hubungan sosial dimana manusia hidup berdampingan dengan berlandaskan pada nilai, norma atau kebiasaan tertentu yang secara fungsional mengikat kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Tangkilisan (2005) membagi pengertian public menjadi tiga (Dr. Iwan Satibi, 2012), yaitu:

- 1) Publik diartikan sebagai umum, seperti public offering (penawaran umum) dan public utility (Perusahaan umum).

- 2) Publik diartikan sebagai masyarakat, seperti public relations (hubungan masyarakat) dan public service (pelayanan masyarakat).
- 3) Publik diartikan sebagai negara, misalnya public authorities (otoritas negara) dan public finance (keuangan negara).

Dari masing-masing pengertian, antara “manajemen” dan “publik”, umumnya manajemen publik diartikan sebagai suatu ilmu interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi dan gabungan dari fungsi manajemen (planning, organizing, actuating, controlling) dengan sumber daya manusia, anggaran, fisik, informasi dan politik. Menurut Yeremias T Keban (dalam Firdausijah, 2023) manajemen publik adalah upaya untuk menunjuk pada manajemen pemerintah. Dengan demikian, manajemen publik adalah proses manajemen yang berlaku pada sektor publik. Beberapa pendapat menganggap sama manajemen publik dengan manajemen pelayanan publik karena sama-sama berorientasi kepada masyarakat.

Manajemen publik memiliki peran yang sangat vital dalam konteks pembangunan daerah, berfungsi sebagai mekanisme yang mengatur dan mengimplementasikan program atau kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam pembangunan manusia, manajemen publik tidak hanya sekadar alat untuk merencanakan dan mengevaluasi kebijakan, tetapi juga berfungsi sebagai penghubung antara visi pembangunan dan realitas yang dihadapi di tingkat daerah.

Pemerintah sebagai aktor utama bertanggung jawab merumuskan kebijakan yang mencakup kebutuhan dasar masyarakat, menyediakan fasilitas yang diperlukan, dan melindungi kelompok rentan. Selain itu, pemerintah perlu melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai lembaga untuk memastikan keberhasilan program pembangunan. Di sisi lain, keterlibatan masyarakat sebagai aktor penting dalam manajemen publik sangat krusial. Masyarakat berperan dalam memastikan bahwa program atau kebijakan yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan lokal dan berfungsi sebagai pengawas terhadap akuntabilitas dan transparansi pemerintah. Dengan demikian, manajemen publik yang efektif dalam konteks pembangunan daerah akan menciptakan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, menghasilkan program pembangunan yang lebih responsif dan sesuai dengan aspirasi komunitas.

1.5.5 Pembangunan Daerah

Secara terminologis, pembangunan identik dengan istilah *development*, *modernization*, *empowering*, *economic growth* dan *political change*. Identifikasi tersebut sangat beragam karena pembangunan juga memiliki makna yang beragam. Menurut Siagian (dalam Afandi et al., 2022) pembangunan sebagai rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana dilakukan secara sadar oleh negara menuju modernitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan adalah:

- 1) Sumber daya alam, yaitu segala yang bersumber dari alam terutama terkait dengan ketersediaan bahan baku produksi sehingga pengolahannya senantiasa berkelanjutan.
- 2) Sumber daya manusia. Salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan adalah jumlah dan kualitas penduduk. Jumlah penduduk yang besar akan menjadi potensi sebagai sasaran hasil produksi sedangkan kualitas penduduk menentukan besaran produktivitas.
- 3) Permodalan yang digunakan untuk mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi yang dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat.
- 4) Ketersediaan lapangan kerja yang memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan.
- 5) Keahlian dan kewirausahaan. Dibutuhkan jiwa kewirausahaan untuk mendukung keahlian agar dapat memperoleh output yang diharapkan.
- 6) Stabilitas politik sebagai modal dasar dalam melakukan aktivitas pembangunan sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas.
- 7) Kebijakan pemerintah untuk menentukan proses pembangunan sehingga pembangunan dapat dilakukan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Menurut Katz (dalam Marwah Auliyani & Muhammad Yafiz, 2022) mengemukakan pembangunan sebagai “*dynamic change of whole society form one state of national being to another; with the connotation that the state is preferable*”. Berdasarkan pendapat ini dapat diketahui bahwa pembangunan sifatnya dinamis, berlangsung dalam seluruh masyarakat, berlangsung secara bertahap dan keadaan baru yang lebih disukai dari keadaan sebelumnya.

Pembangunan daerah dan desentralisasi memiliki hubungan yang erat, di mana desentralisasi memberikan kerangka bagi daerah untuk lebih mandiri dalam menentukan kebijakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokal. Dengan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, desentralisasi memungkinkan daerah untuk memiliki kendali lebih besar atas sumber daya, pengelolaan keuangan, serta pengambilan keputusan terkait pembangunan. Hal ini menghasilkan pengambilan keputusan yang lebih tepat sasaran, karena pemerintah daerah dapat mengidentifikasi masalah dan potensi lokal dengan lebih baik. Selain itu, desentralisasi meningkatkan efisiensi pengelolaan program pembangunan, memungkinkan daerah untuk bertindak lebih cepat tanpa bergantung pada birokrasi pusat, yang pada gilirannya mempercepat akselerasi pembangunan. Pemberdayaan masyarakat juga menjadi aspek penting, di mana desentralisasi mendorong keterlibatan publik dalam proses pembangunan, meningkatkan partisipasi, dan rasa memiliki terhadap

program-program yang dijalankan. Akhirnya, dengan desentralisasi, pembangunan dapat didistribusikan secara lebih merata ke berbagai daerah, sehingga mengurangi ketimpangan antarwilayah. Secara keseluruhan, desentralisasi memainkan peran kunci dalam mendorong pembangunan daerah yang lebih inklusif, efisien, dan tepat sasaran.

1.5.6 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi secara singkat diartikan sebagai peran serta individu atau kelompok dalam suatu upaya mencapai sebuah tujuan. Partisipasi ditandai dengan adanya keterlibatan seseorang, baik secara moril maupun materil yang disertai rasa tanggung jawab. Mengenai partisipasi masyarakat dalam konteks pembangunan, Czapanaskiy & Manjoo (dalam Riyanto & Kovalenko, 2023) mendefinisikannya sebagai upaya melibatkan masyarakat secara aktif dalam pembuatan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik yang mempengaruhi kehidupan mereka dengan memberikan masukan, tanggapan, menyumbangkan waktu, tenaga dan juga ide/gagasan, serta keterlibatan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan program pembangunan. Sependapat dengan ini, Yadav (UNAPDI, 1980) mengemukakan adanya empat kegiatan yang menunjukkan partisipasi masyarakat di dalam kegiatan pembangunan, yaitu:

- 1) Partisipasi dalam pengambilan keputusan

Pada umumnya, program pembangunan masyarakat hanya ditetapkan oleh pemerintah pusat dan kurang

mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat secara luas, maka perlu dibuka forum yang memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi langsung dalam proses pengambilan keputusan tentang program pembangunan di wilayah setempat.

2) Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan diartikan sebagai pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang tunai dan bentuk pengorbanan lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh masyarakat yang bersangkutan. Selain itu, perlu ada pengorganisasian masyarakat dalam pemeliharaan proyek-proyek pembangunan kemasyarakatan yang telah dilaksanakan.

3) Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan

Partisipasi masyarakat dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan bukan hanya untuk meninjau apakah program yang dilaksanakan mampu mencapai tujuan yang telah direncanakan, namun juga diperlukan untuk memperoleh umpan balik tentang masalah dan kendala yang muncul dalam program pembangunan.

4) Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan

Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan kerap kali terlupakan, sehingga masyarakat sasaran justru tidak memahami manfaat dari setiap program pembangunan secara langsung. Hal ini menjadikan program pembangunan masyarakat tidak bernilai dan sia-sia.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan bukan hanya sekedar agar masyarakat menyumbangkan waktu, tenaga dan pikiran mereka untuk negara/daerah, namun juga memastikan bahwa program/kegiatan yang diikuti masyarakat dapat bermanfaat bagi kehidupan mereka. Partisipasi masyarakat juga penting dalam menanggapi isu-isu sosial, ekonomi, budaya dan politik. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Masango (dalam Riyanto & Kovalenko, 2023) bahwa,

“Partisipasi masyarakat yang aktif maka kebijakan publik menjadi lebih terbuka, akuntabel, dan partisipatif sehingga dapat menghasilkan hasil yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, partisipasi masyarakat juga membantu memperkuat ikatan sosial dan kohesi masyarakat serta memperkuat kemampuan masyarakat untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi secara bersama-sama”

Berdasarkan pendapat ahli di atas, partisipasi dari masyarakat juga berorientasi agar kebijakan publik dan pembangunan dapat merespon kepentingan dan kebutuhan masyarakatnya. Partisipasi membuka ruang demokrasi yang dapat mewujudkan kesejahteraan yang lebih merata. Ruang demokrasi dapat terbuka dengan didukung adanya partisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Menurut Hamzah Halim dan Kemal Ridino Syahrul Putera (dalam Callychya et al., 2021) terdapat empat konsep partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, antara lain:

- 1) Partisipasi sebagai kebijakan yang mengartikan partisipasi sebagai prosedur konsultasi para pembuat kebijakan kepada masyarakat sebagai subjek peraturan.
- 2) Partisipasi sebagai strategi dimana partisipasi dilihat sebagai strategi untuk memperoleh dukungan dari masyarakat guna meningkatkan kredibilitas kebijakan pemerintah.
- 3) Partisipasi sebagai alat komunikasi selaku pelayan masyarakat untuk mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat.
- 4) Partisipasi sebagai penyelesaian sengketa dan membangun kepercayaan di masyarakat.

Berdasarkan pendapat dari Hamzah, partisipasi dapat menyelesaikan sengketa. Hal ini sebagaimana yang disampaikan Cohen dan Uphof (dalam Liambo, 2021) tentang tahapan partisipasi sebagai pisau analisis permasalahan, yaitu:

- 1) Partisipasi dalam pembuatan keputusan yaitu partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan memilih alternatif untuk mencapai tujuan bersama.
- 2) Partisipasi dalam pelaksanaan program yaitu keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan operasional pembangunan.

- 3) Partisipasi dalam memperoleh manfaat yang berarti masyarakat menikmati atau mendapat manfaat dari hasil-hasil pembangunan yang dicapai.
- 4) Partisipasi dalam evaluasi yang memberikan kesempatan terbuka bagi masyarakat dalam bentuk keikutsertaan menilai dan mengawasi kegiatan pembangunan serta hasil-hasilnya.

Pendapat di atas selaras dengan model tangga partisipasi dari Arnstein (dalam Setiawan et al., 2020) yang membagi jenjang partisipasi masyarakat menjadi delapan tingkatan partisipasi berdasarkan kekuasaan yang diberikan oleh masyarakat. Tingkatan tersebut antara lain sebagai berikut.

- 1) *Manipulation* yang mengartikan partisipasi hanya sebagai formalitas dan simbolis.
- 2) *Therapy*, yaitu partisipasi bertujuan untuk mengarahkan masyarakat tanpa keterlibatan secara nyata dari masyarakat.
- 3) *Informing*, partisipasi ini masyarakat terbatas pada penerima informasi dan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan.
- 4) *Consultation*, masyarakat dimintai pendapat namun tidak ada jaminan bahwa pendapat mereka akan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.

- 5) *Placation*, melibatkan masyarakat pada proses pengambilan keputusan namun kedudukan dan pengaruhnya relative rendah.
- 6) *Partnership*, pada tingkatan ini menunjukkan adanya pembagian kekuasaan antara masyarakat dengan pemerintah sehingga ada kesepakatan atas pertanggungjawaban.
- 7) *Delegated Power*, pada tingkatan ini masyarakat diberi wewenang untuk membuat keputusan pada proses perencanaan tertentu.
- 8) *Citizen Control*, pada level ini masyarakat memiliki pengaruh dalam mengatur dan mengendalikan seluruh proses pengambilan keputusan, termasuk melakukan negosiasi dengan pihak luar.

Partisipasi masyarakat tidak hanya terbatas pada keterlibatan dalam proses kebijakan formal, namun juga mencakup kontribusi nyata mereka dalam pembangunan. Partisipasi bisa juga dimaknai sebagai bentuk keterlibatan langsung masyarakat dalam mendukung pembangunan. Menurut Oakley (dalam Nurhusna, 2024) Partisipasi masyarakat dapat dilihat melalui lima indikator, antara lain:

- 1) Kontribusi Masyarakat

Kontribusi ini dimaknai sebagai partisipasi masyarakat melalui pemikiran, dana, tenaga dan fasilitas untuk

mendukung program atau kegiatan yang dijalankan oleh pihak tertentu.

2) Pengorganisasian masyarakat

Pengorganisasian merupakan bentuk mengatur dan mengkoordinasikan melalui pembagian kerja, koordinasi, dan komunikasi sebagai elemen untuk mencapai tujuan.

3) Peran masyarakat

Peran masyarakat merujuk pada kontribusi dan keterlibatan masyarakat pada tahap perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan lainnya yang melibatkan masyarakat.

4) Aksi masyarakat

Aksi masyarakat merupakan bentuk konkret dari partisipasi yang menunjukkan keterlibatan langsung dalam mencapai tujuan bersama.

5) Tanggung jawab masyarakat

Tanggung jawab masyarakat merujuk pada perilaku melaksanakan suatu hal dengan ketekunan dan kesanggupan untuk menanggung risiko-risiko yang terjadi atas keputusan yang telah diambil.

Konteks penelitian ini memfokuskan pada pemuda berprestasi dalam akselerasi pembangunan. Safitri & Bagus (dalam Puspasari, 2020) mengemukakan bahwa pemuda merupakan kaum yang berada

pada taraf tertentu dalam perkembangan seorang manusia, dengan kualitas dan ciri tertentu yang memiliki hak dan peran serta kewajiban dengan potensi dan kebutuhan tertentu. Dengan ini, pemuda memiliki peran penting dalam pembangunan daerah. Pemuda harus memiliki kesadaran kuat akan pentingnya pembangunan manusia dan masyarakat. Berdasarkan permasalahan yang terjadi, maka penelitian ini akan fokus pada empat dimensi partisipasi dari Oakley (1991), yaitu kontribusi masyarakat, pengorganisasian, aksi masyarakat, dan tanggung jawab masyarakat.

Penelitian ini akan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Oakley (1991) dibandingkan dengan teori dari ahli lain karena teori yang disampaikan Oakley lebih menekankan pada tindakan nyata yang dilakukan oleh masyarakat. Teori ini adalah teori yang paling relevan untuk mengkaji partisipasi masyarakat dalam praktik yang secara nyata dilakukan. Pendekatan yang dikemukakan oleh Oakley lebih memberikan perspektif yang aplikatif sehingga membantu dalam memahami secara lebih dalam mengenai bagaimana pemuda berprestasi berperan aktif dalam akselerasi pembangunan yang diukur melalui kontribusi langsung mereka. Dengan demikian, teori Oakley lebih sesuai dengan fenomena.

1.5.7 Faktor Berkembangnya Partisipasi Masyarakat

Slamet (dalam Mardikanto, 2013) menyatakan bahwa tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sangat ditentukan oleh tiga unsur pokok, yaitu:

- 1) Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi

Beberapa kesempatan yang dimaksud disini adalah:

- a) Kemauan penguasa melibatkan masyarakat dalam pembangunan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, pemeliharaan dan pemanfaatan.
- b) Kesempatan memperoleh informasi pembangunan
- c) Kesempatan memanfaatkan dan memobilisasi sumber daya, baik SDA maupun SDM
- d) Kesempatan untuk menggunakan teknologi termasuk peralatan penunjang
- e) Kesempatan untuk berorganisasi
- f) Kesempatan untuk mengembangkan kepemimpinan untuk mengembangkan dan memelihara partisipasi

- 2) Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi

Kemauan untuk berpartisipasi lebih ditentukan oleh sikap mental yang dimiliki oleh masyarakat, yang menyangkut:

- a) Sikap untuk meninggalkan nilai-nilai yang menghambat pembangunan

- b) Sikap terhadap penguasa atau pelaksana pembangunan pada umumnya
- c) Sikap selalu ingin memperbaiki mutu hidup dan tidak cepat puas
- d) Sikap kebersamaan untuk memecahkan masalah dan mencapai tujuan pembangunan
- e) Sikap kemandirian dan percaya diri atas kemampuan yang dimiliki

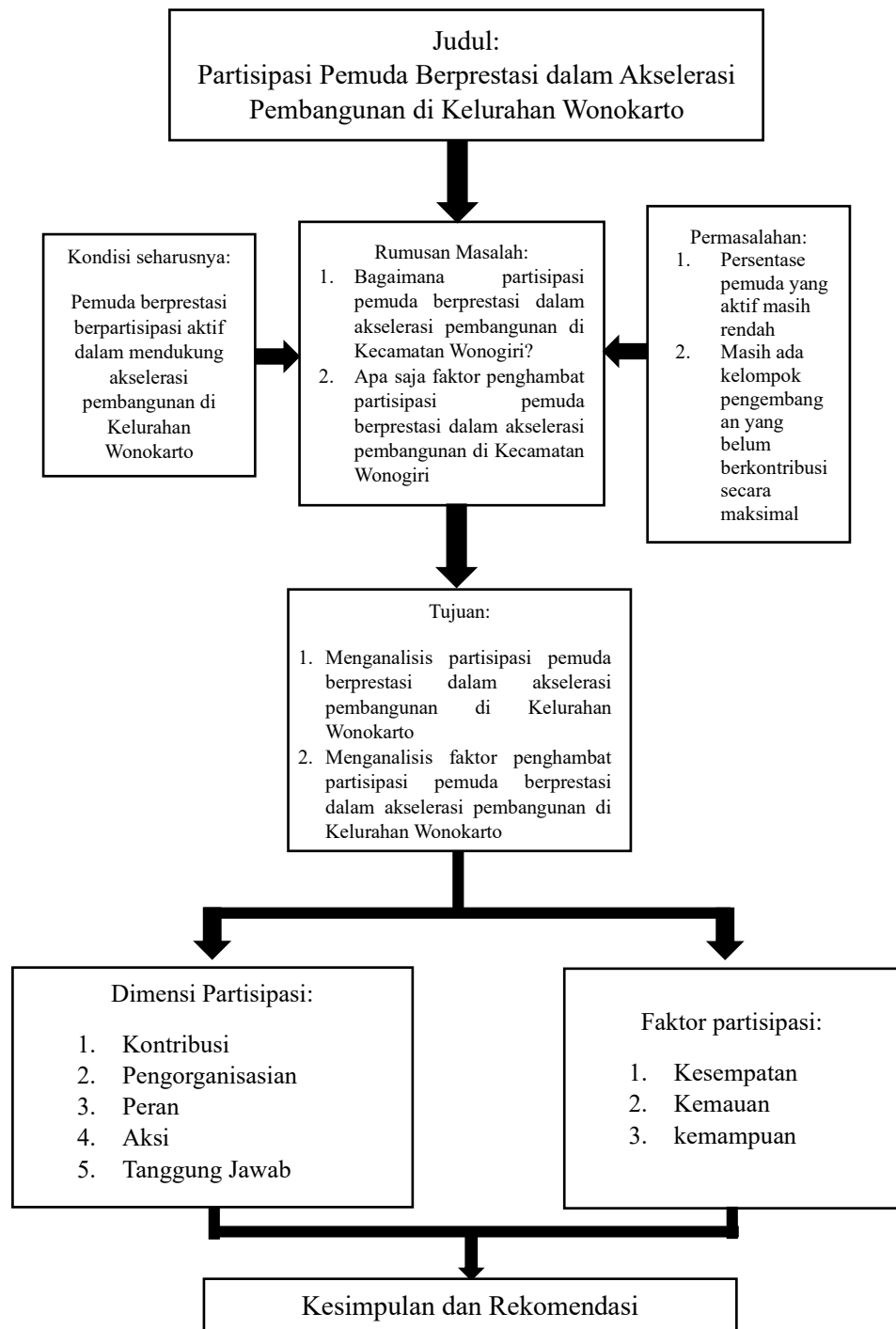
3) Adanya kemampuan untuk berpartisipasi

Kemampuan yang dimaksud disini adalah:

- a) Kemampuan untuk menemukan dan memahami kesempatan dan peluang untuk membangun
- b) Kemampuan untuk melaksanakan pembangunan berdasarkan tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki
- c) Kemampuan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya dengan memanfaatkan sumber daya dan kesempatan yang dimiliki secara optimal.

1.5.8 Kerangka Berpikir

Bagan 1.4 Kerangka Berpikir



1.6 OPERASIONALISASI KONSEP

Definisi operasional menurut Ulber Silalahi yang dikutip oleh Wardhana (dalam Amruddin, 2022) adalah mengubah konsep-konsep tersebut dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati dan dapat diuji sehingga dapat ditentukan kebenarannya oleh orang lain. Dengan demikian, operasionalisasi konsep digunakan agar penelitian dapat fokus pada persoalan yang diteliti.

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan partisipasi dengan indikator menurut Oakley (1992). Partisipasi merupakan keterlibatan individu dalam suatu kegiatan, baik secara fisik maupun nonfisik dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan kesadaran penuh dan tanggung jawab. Dalam konteks penelitian ini, partisipasi yang dinilai adalah partisipasi mahasiswa penerima penghargaan pemuda berprestasi terhadap akselerasi pembangunan di Kelurahan Wonokarto. Adapun Indikator yang digunakan antara lain:

- 1) Kontribusi masyarakat, artinya adalah partisipasi pemuda berprestasi dalam memberikan sumbangan, baik berupa tenaga, waktu, pemikiran dan dana untuk mencapai tujuan tertentu. peneliti akan mengamati kontribusi pemuda berprestasi melalui beberapa aspek sebagai berikut:
 - a. Kontribusi pemikiran
 - b. Kontribusi dana
 - c. Kontribusi tenaga

- 2) Pengorganisasian, artinya pembagian kerja, koordinasi, dan komunikasi sebagai elemen untuk mencapai tujuan. Beberapa aspek penting yang akan peneliti alami tentang pengorganisasian adalah:
- a. Pembagian kerja
 - b. Proses koordinasi
 - c. Proses komunikasi
- 3) Peran, merujuk pada kontribusi dan keterlibatan pemuda berprestasi pada tahap perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan dan kegiatan lainnya yang melibatkan masyarakat. Pada penelitian ini, peneliti akan mendalami peran pemuda berprestasi dalam kegiatan berikut:
- a. Peran dalam perencanaan
 - b. Peran dalam pengambilan keputusan
 - c. Peran dalam evaluasi
- 4) Aksi masyarakat, artinya pemuda berprestasi mengambil bagian dalam pembangunan, baik secara individu maupun kelompok. Aspek yang akan digali dalam dimensi ini adalah:
- a. Tindakan nyata
 - b. Keterlibatan langsung
- 5) Tanggung jawab masyarakat, artinya ada komitmen dan tanggung jawab dari pemuda berprestasi dalam proses

pembangunan SDM masyarakat Kabupaten Wonogiri. Aspek penting dalam dimensi ini adalah:

- a. Komitmen dalam berpartisipasi

Kemudian, penelitian ini juga akan mengarah pada unsur yang mendorong berkembangnya partisipasi mahasiswa penerima penghargaan pemuda berprestasi dalam pembangunan SDM di Kabupaten Wonogiri melalui tiga unsur, yaitu:

- 1) Kesempatan berpartisipasi, artinya pemuda berprestasi memiliki kesempatan dalam aspek berikut:
 - a. Kesempatan memperoleh informasi
 - b. Kesempatan membentuk organisasi
- 2) Kemauan berpartisipasi merupakan sikap mental dari pemuda berprestasi terhadap partisipasi mereka dalam akselerasi pembangunan. Aspek yang digali dalam dimensi ini adalah:
 - a. Kemauan berpartisipasi
- 3) Kemampuan berpartisipasi, artinya pemuda berprestasi memiliki kemampuan untuk mendukung akselerasi pembangunan di lingkungan Kelurahan Wonokarto. aspek yang digali dalam dimensi ini adalah:
 - a. Kemampuan memanfaatkan potensi diri
 - b. Kemampuan mengelola waktu, tenaga dan pikiran.

Untuk tabel fenomena, sub fenomena, pertanyaan dan informan dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 1.3 Operasionalisasi Konsep

Teori	Fenomena	Sub Fenomena
Partisipasi	Kontribusi	Pemikiran
		Dana
		Tenaga
	Pengorganisasian	Pembagian kerja
		Proses koordinasi
		Proses komunikasi
	Peran	Perencanaan
		Pengambilan keputusan
		Evaluasi
	Aksi	Tindakan nyata
		Keterlibatan langsung
	Tanggung Jawab	Komitmen dalam berpartisipasi
Faktor penghambat	Kesempatan	Kesempatan memperoleh informasi terkait kondisi sosial
		masyarakat kesempatan membentuk organisasi/ kepanitiaan
	Kemauan	Kemauan berpartisipasi
	Kemampuan	Kemampuan memanfaatkan potensi diri
		Kemampuan mengelola waktu, tenaga, pikiran

1.7 ARGUMEN PENELITIAN

Salah satu program yang telah berjalan selama dua periode kepemimpinan Bupati Wonogiri, Joko Sutopo adalah Program Pemberian Penghargaan bagi Pemuda Berprestasi. Sasaran dari program ini adalah mahasiswa Wonogiri dari berbagai universitas berakreditasi A/Unggul, baik negeri maupun swasta di Indonesia. Sebagai sasaran program, mahasiswa penerima tidak hanya menerima bantuan biaya pendidikan, namun juga terlibat dalam akselerasi pembangunan di Kabupaten Wonogiri, Dalam hal

ini, mahasiswa calon penerima penghargaan juga telah menandatangani surat pernyataan komitmen pada saat mengikuti seleksi.

Namun pada kenyataannya, ada pemuda berprestasi yang belum menunjukkan kontribusi mereka secara nyata kepada daerah, terutama daerah tempat tinggalnya. Poin keaktifan yang diolah dari hasil keikutsertaan mahasiswa penerima penghargaan dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan masih didominasi status kurang aktif. Selain itu masih ada kelompok pengembangan yang belum berkontribusi secara maksimal terhadap pembangunan di lingkungan desa/kelurahan masing-masing.

Penelitian ini akan fokus menggunakan pendekatan partisipasi dengan dimensi yang disampaikan Oakley (1991) untuk menjawab pertanyaan penelitian terkait bagaimana partisipasi pemuda berprestasi dalam akselerasi pembangunan dan faktor penghambat partisipasi berdasarkan yang disampaikan Slamet (1985).

1.8 METODE PENELITIAN

1.8.1 Tipe Penelitian

Dilihat dari taraf pembahasan, maka penelitian ini merupakan penelitian tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Winarta (dalam Ridwan et al., 2021), metode analisis deskriptif kualitatif meliputi analisis, interpretasi, dan peringatan mengenai berbagai kondisi yang diperoleh dari rangkaian informasi yang diperoleh dari hasil survei atau dari diskusi mendalam yang dilakukan

secara langsung mengenai permasalahan yang diangkat dalam rangkaian. Penelitian kualitatif merupakan tipe penelitian yang berasaskan pada filsafat postpositivisme sebab tujuan dari penelitian tipe ini adalah untuk membuat suatu fakta atas fenomena agar udah dimengerti dan memungkinkan untuk melahirkan hipotesis baru. sejalan dengan argumentasi dari Denzin & Lincoln (dalam Fadli, 2021) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu fenomena yang ada dan dilakukan dengan menggunakan metode yang ada. Metode penelitian kualitatif diharapkan menghasilkan temuan yang akurat, jelas, dan konsisten melalui observasi, tulisan, atau percakapan dengan individu, kelompok, atau komunitas tertentu yang menjadi objek penelitian.

Penelitian ini berusaha mengungkapkan bagaimana partisipasi mahasiswa penerima penghargaan pemuda berprestasi dalam pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Wonogiri. Penelitian ini didasari dengan adanya kewajiban penerima penghargaan untuk berkontribusi aktif kepada daerah Kabupaten Wonogiri maka penelitian ini akan menggunakan pendekatan partisipasi sekaligus faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi tersebut yang dilihat dari kemauan, kemampuan dan kesempatan berpartisipasi.

1.8.2 Situs Penelitian

Situs penelitian merupakan lokasi dilakukannya penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti memilih Kelurahan Wonokarto sebagai

situs penelitian. Hingga saat ini belum banyak ditemukan penelitian mengenai topik partisipasi pemuda berprestasi dalam akselerasi pembangunan, khususnya di Kelurahan Wonokarto, sehingga peneliti tertarik untuk memiliki situs penelitian ini. Selain itu, ditemukan permasalahan yang sesuai dengan fenomena pada penelitian ini, yaitu partisipasi pemuda berprestasi di Kelurahan Wonokarto.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu atau kelompok yang menjadi narasumber terkait fenomena. Dalam penelitian ini, subjek penelitian adalah pemuda berprestasi, pihak Kelurahan Wonokarto, pihak Kecamatan Wonogiri dan pihak Dispora Kabupaten Wonogiri selaku pendamping pengelola program penerima penghargaan pemuda berprestasi.

Tabel 1.4 Daftar Informan

Informan	Jumlah
Pemuda berprestasi penerima penghargaan	5
Sekretaris Kelurahan Wonokarto	1
Kepala Bidang Pelayanan Umum Kecamatan Wonogiri	1
Analisis Kepemudaan Disporapar Kab. Wonogiri	1

Peneliti memilih subjek informan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan fokus penelitian. Informan utama berasal dari kalangan pemuda berprestasi di Kelurahan Wonokarto, dengan prioritas pada mereka yang memiliki tingkat keaktifan paling rendah dalam kegiatan mendukung akselerasi pembangunan. Pemilihan informan

dengan kriteria ini bertujuan untuk menggali secara mendalam faktor-faktor yang menjadi penghambat partisipasi mereka dalam mendukung akselerasi pembangunan di tingkat kelurahan. Dengan demikian, peneliti dapat memperoleh pemahaman komprehensif mengenai kendala yang dihadapi, baik dari aspek internal pemuda maupun dari lingkungan sosial dan kelembagaan. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak-pihak dari instansi pemerintah yang menjadi mitra kerja pemuda berprestasi, baik di tingkat kelurahan, kecamatan, maupun kabupaten. Berdasarkan hasil identifikasi lapangan, terdapat tiga informan kunci yang dinilai memiliki peran strategis dan wawasan yang mendalam mengenai dinamika partisipasi pemuda, yaitu Sekretaris Kelurahan Wonokarto, Kepala Bidang Pelayanan Umum Kecamatan Wonogiri, dan Analis Kepemudaan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Wonogiri. Ketiganya dipilih karena dinilai mampu memberikan informasi yang akurat dan relevan mengenai pola kemitraan, tantangan, serta potensi peningkatan peran pemuda berprestasi dalam pembangunan, khususnya di lingkungan Kelurahan Wonokarto.

1.8.4 Jenis Data

Penelitian ini merupakan penelitian yang turun langsung ke lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, sehingga data yang dihasilkan berupa kata-kata atau ucapan narasumber yang dinarasikan menjadi kesatuan data yang utuh.

1.8.5 Sumber Data

Sumber data adalah sesuatu yang menjadi sumber utama dalam penelitian. Adapun sumber dari penelitian kualitatif ini dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari tangan pertama terkait variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini, sumber data primer meliputi hasil wawancara kepada informan yang telah ditentukan serta hasil observasi terhadap subjek penelitian. Observasi dilakukan secara langsung pada kegiatan kunjungan yang dilakukan oleh pemuda berprestasi ke Kelurahan Wonokarto.
- 2) Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung dikumpulkan dari tangan pertama, melainkan dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Data ini sifatnya mendukung data primer. Pada penelitian ini, data sekunder bersumber dari studi dokumen.

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh data dan informasi yang relevan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pertanyaan yang perlu diperhatikan selama proses pengumpulan data mencakup apa, di mana, kapan, dan bagaimana suatu peristiwa atau fenomena terjadi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam,

observasi, dan studi dokumen sebagai pendekatan utama. Ketiga teknik tersebut tidak hanya digunakan untuk memperkaya data, tetapi juga sebagai bagian dari triangulasi sumber dan teknik, guna memastikan keabsahan dan validitas data yang diperoleh. Dengan menerapkan triangulasi, peneliti dapat membandingkan dan mengonfirmasi temuan dari berbagai sumber dan metode, sehingga hasil penelitian menjadi lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

1) Wawancara

Menurut Seidman (dalam Fadli, 2021), wawancara bertujuan untuk mencatat pendapat, perasaan termasuk emosi dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan individu yang ada dalam suatu organisasi. Wawancara dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh banyak data sesuai situasi dan kondisi dari pihak yang diwawancara dan dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang tidak diketahui sebelumnya. Adapun yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah pemuda berprestasi, Sekretaris Kelurahan, Kabid Pelayanan Umum Kecamatan Wonogiri, dan Analis Kepemudaan Disporapar Kabupaten Wonogiri.

2) Observasi

Observasi merupakan kegiatan mengamati langsung apa yang menjadi objek dalam penelitian. Observasi biasanya dilakukan terhadap suatu aktivitas, peristiwa, kejadian atau

suatu kondisi tertentu. penelitian ini akan menggunakan jenis observasi tidak berstruktur, yaitu observasi yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman sehingga peneliti diharuskan mampu mengembangkan hasil pengamatannya.

3) Studi dokumen

Studi dokumen merupakan sumber pendukung hasil wawancara dan observasi. Sumber dokumen bisa berasal dari dokumen surat-menyurat, catatan administrasi, agenda, hingga data-data yang tersimpan di server atau tersimpan di website. Studi dokumen berkaitan dengan dokumen, berita atau publikasi bentuk lainnya yang memuat tentang kegiatan pemuda berprestasi serta profil mengenai pembangunan di Kecamatan Wonogiri, baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

1.8.6 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data adalah proses sistematis menganalisis dan mensintesis data dari dokumen, wawancara, dan lapangan untuk mengatur data ke dalam kategori dan mendeskripsikan serta mensintesis, memilah-milah ke dalam pola, mengklasifikasikan, dan menarik kesimpulan.

Model Miles dan Huberman merupakan model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Menurut Miles dan Huberman (dalam Yuzalia et al., 2021), kegiatan dalam analisis data kualitatif

harus bersifat interaktif dan berkelanjutan hingga selesai, memastikan keakuratan data. Dalam analisis data, kegiatan terdiri dari reduksi data, visualisasi data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

1) *Data Reduction* dalam *Data Collection*/Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan kegiatan utama pada setiap penelitian. Peneliti akan mendapat data yang banyak dan bervariasi melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Karena jumlah data yang diperoleh dari spesimen laparoskopi cukup besar, maka harus dicatat secara akurat dan ringkas. Dengan melakukan reduksi terhadap data, maka peneliti akan memperoleh gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan selanjutnya. Dalam mereduksi data, peneliti akan dipandu oleh teori dan tujuan yang akan dicapainya.

2) *Data Display*/Penyajian Data

Setelah data diolah, tugas penulis adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, data yang disajikan merupakan teks dengan tingkat keakuratan yang tinggi. Dengan menyediakan data, peneliti akan lebih mudah memahami apa yang terjadi dan menentukan apa yang harus dilakukan setelahnya. Pada praktiknya tidak mudah, sebab peneliti harus menguji apa yang ditemukan di lapangan karena fenomena sosial merupakan fenomena yang bersifat

kompleks dan dinamis, sehingga terus mengalami perkembangan. Apabila pola yang telah didapat telah didukung oleh data dalam penelitian, maka pola tersebut menjadi pola yang baku yang selanjutnya akan disajikan pada laporan akhir penelitian.

3) *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah selanjutnya menurut Miles and Huberman dalam Sugiyono (2018) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan suatu penemuan baru yang belum ada sebelumnya. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila data-data yang ditemukan pada penelitian tidak kuat. Kesimpulan pada penelitian kualitatif bisa langsung menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, namun bisa juga tidak karena rumusan masalah bisa sewaktu-waktu berkembang ketika peneliti turun lapangan.

1.8.7 Kualitas Data

Kualitas penelitian kualitatif diukur dengan tiga prinsip, yaitu:

1) *Rigour* (keseluruhan dan ketepatan penggunaan metode)

Prinsip ini menekankan bahwa tidak boleh ada sekecil apapun informasi yang tertinggal. Peneliti wajib berusaha dengan keras untuk mengumpulkan informasi sedetail

mungkin untuk selanjutnya dianalisis. Hal ini menyebabkan penelitian kualitatif akan berlangsung lama. Di samping terpenuhinya aspek prinsip keseluruhan, kualitas penelitian juga ditentukan dengan ketepatan metode penelitian dan analisis data yang digunakan yang juga meliputi transparansi bagaimana penelitian dilakukan.

2) *Credibility* (kebermaknaan dan penyajian secara baik)

Ketika peneliti sudah memperoleh suatu temuan, hal ini bukan akhir dari perjalanan peneliti. Masih ada tugas lain seorang peneliti yaitu mempublikasikan hasil penelitian tersebut, sebab pada dasarnya penelitian bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh publik. Dalam penelitian ini, temuan penelitian akan dipublikasikan sebagai karya ilmiah, yaitu skripsi.

3) *Relevance* (kegunaan temuan)

Maksud dari prinsip ini adalah sejauh mana relevansi temuan penelitian dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian bisa dilakukan sebagai dasar perubahan pada bidang tertentu dan metode yang digunakan selama proses penelitian dapat dikembangkan oleh peneliti selanjutnya.